



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – PD) BAPPENDA TAHUN 2022



Pemerintah Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telepon (022) 6652559
Fax. (022) 6632308 Website : bappenda.cimahikota.go.id email : dispendakotacimahi@gmail.com
Cimahi Jawa Barat – 40513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 050 / 453 / Bappenda

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 sebagai pedoman unit kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2022;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat P-RENJA PD, merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2022;

- KETIGA : Isi dan uraian perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 09 Agustus 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



 **Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi serta merupakan turunan dari perubahan Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan juga anomali yang terjadi, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian perubahan Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara umum, Bappenda Kota Cimahi telah dapat melaksanakan program/ kegiatan pada tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2022 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.139.060.952,- (*tiga belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*), untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang telah ditetapkan pada Tahun 2022.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Cimahi, 09 Agustus 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi	II-1
2.2 Analisis Kinerja Bappenda Kota Cimahi	II-20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda	II-28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-35
2.6 Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022	II-40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-3
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Kota Cimahi	II-2
Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	II-23
Tabel 2.3. Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.4. Komposisi PAD Kota Cimahi Tahun 2021	II-24
Tabel 2.5. Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi	II-26
Tabel 2.6. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2020	II-27
Tabel 2.7. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017-2020	II-27
Tabel 2.8. Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2020	II-28
Tabel 2.9. Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2017-2020	II-29
Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Cimahi	II-33
Tabel 2.11. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Cimahi	II-42
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022	III-4
Tabel 4.1. Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022	IV-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)	II-30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan rencana tahunan kelima dalam pelaksanaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli

daerah dari sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 adalah manifestasi dari dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat di dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu di dalam Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik maupun perubahan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Disamping itu, Rencana kerja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan perubahan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);

22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);
26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 663);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 serta visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi Pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.

- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun Anggaran Belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- b. Melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Melakukan pengukuran, evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun Tahun 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu rancangan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun sebelumnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi tahun sebelumnya ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020, dan 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas PD	BB Predikat	0,00 Predikat	BB Predikat	BB Predikat	100	BB Predikat	BB Predikat	100
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	58,97 %	0,00 %	53,85 %	53,85 %	100	94,59 %	94,59 %	160,40
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33 dok	0 dok	17 dok	17 dok	100	17 dok	34 dok	103,03

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.01.01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
		Jumlah dokumen renja	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen renstra	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	200
		Jumlah forum perangkat daerah	2 keg	0 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	2 keg	100
5.02.01.2.01.07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
		Jumlah dokumen SAKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen SKM	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	24 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01.2.02.01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	28 kali	0 kali	14 kali	14 kali	100	14 kali	28 kali	100
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	24 kali	0 kali	13 kali	13 kali	100	12 kali	25 kali	104
5.02.01.2.02.07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 keg	0 keg	2 keg	1 keg	50	2 keg	3 keg	75
5.02.01.2.05.07	SubKeg pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 stel	0 dok	0 stel	0 stel	-	0 stel	0 stel	-
5.02.01.2.	SubKeg Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai yang difasilitasi	7 peg	0 peg	5 peg	0 peg	-	23 peg	23 peg	328,57

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
05.1 1	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bimtek								
		Jumlah pegawai yang dibina	70 peg	0 peg	70 peg	70 peg	100	70 peg	70 peg	100
5.02. 01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02. 01.2. 06.0 1	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02. 01.2. 06.0 2	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	0 unit	11 unit	11 unit	100	10 unit	21 unit	190,91
		Jumlah bulan penyediaan ATK	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02. 01.2. 06.0 3	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	35 jenis/ set	0 jenis/ set	18 jenis/ set	18 jenis/ set	100	17 jenis/ set	35 jenis/ set	100
5.02. 01.2. 06.0	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Kantor	kantor								
5.02.01.2.06.05	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	14 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	14 jenis	100
		Jumlah bulan penggandaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.06	SubKeg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	-	0 bln	0 bln	-
		Jumlah buku peraturan	2 buku	0 buku	0 buku	0 buku	-	0 buku	0 buku	-
5.02.01.2.06.08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.06.09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintah Daerah									
5.02.01.2.07.09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	100
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.08.01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.08.02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah bulan jasa listrik	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.02.01.2.09.02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	0 unit	10 unit	6 unit	60	5 unit	10 unit	100
5.02.01.2.09.10	SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	2,00 %	0,00 %	6,40 %	13,18 %	205,94	-9,45 %	-9,45 %	100
		% Realisasi Pajak Daerah	95 %	0 %	90 %	117,74 %	130,82	95 %	100,00 %	105
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.01	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.04.2.01.02	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	3 dok	5 dok	125
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
5.02.04.2.01.0	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak	14 keg	0 keg	7 keg	7 keg	100	7 keg	14 keg	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Kebijakan Pajak Daerah	daerah								
5.02.04.2.01.04	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	4 modul	0 modul	2 modul	2 modul	100	2 modul	4 modul	100
		Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem	0 sistem	3 sistem	3 sistem	100	3 sistem	3 sistem	100
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.04.2.01.05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.07	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	129.608 WP	129.608 WP	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
5.02.04.2.01.08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	135.100 WP	135.100 WP	100
5.02.04.2.01.09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100 %	0 %	0 %	0 %	-	0 %	0 %	-
5.02.04.2.01.10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	129.608 WP	129.608 WP	100
5.02.04.2.01.11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	12 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	12 kali	-
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2.972 WP	0 WP	1.356 WP	1.356 WP	100	1.616 WP	2.972 WP	100
5.02.04.2.01.1	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak	% Penyelesaian permohonan keberatan dan	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Daerah	pengurangan pajak daerah								
5.02.04.2.01.13	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	540 obj pjk	0 obj pjk	240 obj pjk	240 obj pjk	100	300 obj pjk	540 obj pjk	100
5.02.04.2.01.14	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	24 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	24 kali	100

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dan capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2020, tidak dapat dituangkan ke dalam tabel sehubungan dengan adanya kebijakan pusat dalam penyusunan perencanaan, namun dapat dilihat sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar 4,08% dari target -8,07%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan **sangat baik**.
- Hasil pengukuran kinerja capaian kinerja program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Program perencanaan, pengelolaan anggaran daerah, barang milik daerah, dan perbendaharaan daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :.
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 158.937.237.899 sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 163.136.977.065, dengan terrealisasi peningkatannya sebesar -2,57% dari target -16,03%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka nilai kinerjanya dikatakan sangat baik.

b. Realisasi target pendapatan daerah

Hasil pengukuran kinerja realisasi target pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut bahwa realisasi pendapatan daerah tahun berjalan sebesar Rp. 1.457.996.459.899,91 sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.462.841.536.679,92, dengan persentase capaian sebesar 99,67%, maka nilai kinerjanya dikatakan mempunyai makna baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor, mempunyai indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dilihat berdasarkan dari jumlah jenis sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan kerja yang tertuang dalam kartu inventaris ruangan (KIR), dari 23 ruangan ada sebanyak 217 jenis sarana prasarana yang terinventarisir dan sebanyak 217 jenis sarana dan prasarana dalam kondisi baik, ruangan-ruangan tersebut.
 3. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, mempunyai indikator kinerja Persentase ASN yang dibina, dengan capaian kinerja 100%, dilihat dari jumlah ASN yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 71 pegawai.
 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama nilai LAKIP Bappenda Kota Cimahi, nilai yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 75,92, Sementara pada tahun 2019 perolehan nilai sebesar 77,06, adanya penurunan, namun masih dengan kategori BB dan interpretasi sangat baik, akuntabel. Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Selain itu untuk indikator kedua persentase realisasi anggaran, dimana target kinerja yang ditetapkan 95,34% dengan realisasi kinerja 94,44% capaian kinerjanya 99,06%.
- Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari tahun sebelumnya terhadap Rencana

Strategis (RENSTRA) dari target capaian kondisi akhir sebesar 1,95%, sedangkan untuk target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 sebesar -8,07%, terrealisasi pada periode tahun ketiga sebesar 4,08% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 250,56%, capaian tersebut dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik, akibat dari peristiwa Pandemi Covid-19. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan PAD.

- Realisasi anggaran belanja langsung sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2020 yaitu, realisasi keuangan sebesar 94,44% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.
- Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah yang persentase efisiensinya mencapai 17,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentase efisiensinya mencapai 20,13%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentase efisiensinya mencapai 14,63%, selain itu pada kegiatan penataan arsip daerah yang persentase efisiensinya mencapai 10,27%.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	26,61%	26,65%	100,15 %	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja 26,61% terrealisasi sebesar 26,65% dengan capaian kinerja 100,15% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.520.135.560.503, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 26,65%. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.

- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu

meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,74%	7,83%	301,16%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,83% dengan capaian kinerja 301,16% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, terrealisasi peningkatannya sebesar 7,83% dari target -7,74%, capaian tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

- Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
- Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-3.87%	13,18%	540,57%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	90%	117,74%	130,82%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	53,85%	53,85%	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :.

- Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Target kinerja -3,87% terrealisasi sebesar 13,18% dengan capaian kinerja 540,57% atau mempunyai makna

Sangat Baik, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 179.891.802.962,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 158.937.237.899,- dengan terrealisasi penurunannya sebesar 13,18% dari target -3,87%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

- Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 90% terrealisasi sebesar 117,74% dengan capaian kinerja 130,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPTHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 117,74,% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,82%. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
Hotel	219.703.500	283.417.966	129
Restoran	14.278.402.073	17.018.807.906	119,19
Hiburan	88.096.000	123.330.330	140
Reklame	1.748.195.268	2.326.007.100	133,05
Penerangan Jalan	34.709.763.147	37.701.852.705	108.62
Parkir	620.000.000	937.097.932	151,14
Air Tanah	6.360.000.000	8.237.134.116	129,51
BPHTB	42.262.327.061	55.960.840.082	132,41
PBB-P2	52.500.391.242	57.303.314.555	109,15
Jumlah	152.786.878.291	179.891.802.692	117,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 128%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai 76,03% dengan kategori BB, sehingga mempunyai makna baik, bila membandingkan dengan nilai tahun lalu yaitu sebesar 75,92% terdapat kenaikan sebesar 0,11%, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi.

- Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, dan Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah.

- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 53,85% terrealisasi sebesar 53,85% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 21 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2021 berjumlah sebanyak 39 orang dengan realisasi sebesar 53,85% dari target 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	135.100 WP	100%	Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Baik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kegiatan sebesar 94%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Bappenda Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, sehingga Bappenda Kota Cimahi cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang dibuat oleh Bappenda Kota Cimahi.

2.2.1. Analisis Desentralisasi Fiskal

Menurut Bisma (2010 : 78) Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rumusan rasio desentralisasi fiskal yaitu :

$$\text{ddf} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

TABEL 2.3
ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2018	1,316,230,476,122.39	335,016,530,127,39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang
2020	1.457.996.459.899,91	375.687.242.678,91	25.77%	Sedang
2021	1.520.135.560.503,11	405.104.991.553,11	26.65%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan desentraliasasi fiskal di Kota Cimahi pada tahun 2018-2021 masih berada pada kategori posisi sedang.

TABEL 2.4
KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI (Rp.)	% Terhadap PAD
1	Hasil Pajak Daerah	179.891.802.692,00	44,41
2	Hasil Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	2,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	2,46
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	203.707.746.221,11	50,29
JUMLAH PAD		405.104.991.553,11	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 50,29%, kemudian disusul oleh komponen pajak daerah sebesar 44,41%, retribusi daerah 2,85%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,46%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 - 2021

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2018 - 2021, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah ditetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 108,62%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 109,29%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 109,03%, kemudian retribusi daerah sebesar 101,58% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 101,03%.

Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 - 2021, sebagai berikut :

TABEL 2.5
RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	102	101	116	118	109
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	94	109	103	101	102
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	100	100	104	100	101
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	104	102	112	118	109
JUMLAH	326.842.694.184	354.211.073.635	331.843.741.664	346.622.143.134	335.016.530.127	360.955.331.173	375.687.242.679	405.104.991.553	103	102	113	117	109

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 109%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 118% dari target sebesar Rp. 179.891.802.962,- dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.6
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	102	101	116	118	109

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 102%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2021 sebesar 101% dari target sebesar Rp. 11.548.482.640,- hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	94	109	103	101	102

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 (diolah – audit BPK)

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018-2021 sebesar 101 %, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2021 sebesar 100% dari target sebesar Rp. 9.956.960.000, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.8
TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	100	100	104	100	101

Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 non Audit (diolah)

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018-2021 sebesar 109%, sedangkan capaian

realisasi pada tahun 2021 sebesar 118% dari target sebesar Rp. 203.707.746.221,- pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.9
TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TAHUN 2018-2021

Komponen PAD	Target (Rp.)				Realisasi (Rp.)				% Capaian				% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	104	102	112	118	109

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021
(diolah – audit BPK)

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui Pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan.
3. Pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
4. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan angka pengangguran oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
5. Kondisi makro ekonomi nasional yang kondusif.

2.2.8. Faktor Yang Menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Luas wilayah yang relatif kecil (40 km²) dimana sepertiga wilayah adalah pusat pendidikan militer.
4. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
5. Data Base belum valid (PBB).
6. Masih lemahnya pertumbuhan ekonomi kota yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
7. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
8. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif dan pengaruh negatif eksternal lainnya.

2.2.9. Potensi Baru

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pendekatan Teknis, yaitu :
 - a. Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - b. Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan atau penyempurnaan regulasi.

GAMBAR 2.1
STRATEGI PENINGKATAN ASLI DAERAH (PAD)



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Masalah perizinan (Air tanah, reklame).
3. Data Base belum valid (PBB).
4. Masih lemahnya koordinasi sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Tidak adanya SDA potensial.
6. Kondisi makro ekonomi nasional yang kurang kondusif.
7. Pertumbuhan ekonomi kota belum secara signifikan meningkatkan daya beli masyarakat.
8. Seiring berjalannya waktu maka potensi pajak meningkat namun belum dilakukan pembaharuan potensi pajak.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan denganTupoksi.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dengan memberikan *reward* kepada yang berprestasi dan *punishment* yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi yang sinergis seoptimal mungkin dengan instansi maupun aparat terkait.
4. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Berikut ini disajikan review Perubahan Rencana Kerja Bappenda Kota Cimahi terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 :

TABEL 2.10
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022
KOTA CIMAHI

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-6,52%	3.154.498. 600	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-6,52%	3.154.498. 600	
		% Realisasi Pajak Daerah	100,00 %				% Realisasi Pajak Daerah	100,00 %		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	118.580 WP	3.154.498. 600	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	118.580 WP	3.154.498. 600	
<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan</i>	<i>2 dok</i>	<i>58.429.400</i>	<i>SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan</i>	<i>2 dok</i>	<i>58.429.400</i>	
<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen produk hukum</i>	<i>2 dok</i>	<i>207.370.20 0</i>	<i>SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah dokumen produk hukum</i>	<i>3 dok</i>	<i>207.370.20 0</i>	
		<i>Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah</i>	<i>1 dok</i>				<i>Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah</i>	<i>1 dok</i>		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	7 keg	144.637.20 0	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	7 keg	144.637.20 0	
SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul	658.013.60 0	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul	658.013.60 0	
		Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem				Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem		
		Jumlah bulan sistem yang dipelihara	12 bulan				Jumlah bulan sistem yang dipelihara	12 bulan		
SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	341.517.50 0	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	118.580 WP	341.517.50 0	
SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	51.921.000	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	118.580 WP	51.921.000	
SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	95.756.700	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	115.098 WP	95.756.700	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	814.961.10 0	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	118.580 WP	814.961.10 0	
SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	168.960.30 0	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	116.425 WP	168.960.30 0	
SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	500 WP	130.230.60 0	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	1.616 WP	130.230.60 0	
		Jumlah penagihan pasif	1.116 WP							
SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengggurangan pajak daerah	100 %	112.969.10 0	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengggurangan pajak daerah	100 %	112.969.10 0	
SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 dok	291.620.10 0	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 dok	291.620.10 0	
SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali	78.111.800	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali	78.111.800	
PROGRAM		Nilai	BB	9.984.562.	PROGRAM		Nilai	BB	9.984.562.	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat	352	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Akuntabilitas Perangkat Daerah	Predikat	352	
		% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %				% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %		
		% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59 %				% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59 %		
Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dok	125.683.000	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dok	125.683.000	
SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dok	69.394.200	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dok	69.394.200	
		Jumlah dokumen renja	1 dok				Jumlah dokumen renja	1 dok		
		Jumlah dokumen renstra	0 dok				Jumlah dokumen renstra	1 dok		
		Jumlah dokumen renja perubahan	1 dok				Jumlah dokumen renja perubahan	1 dok		
		Jumlah forum perangkat daerah	1 keg				Jumlah forum perangkat daerah	1 keg		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 dok	56.288.800	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 dok	56.288.800	
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dok				Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dok		
		Jumlah dokumen SAKIP	1 dok				Jumlah dokumen SAKIP	1 dok		
		Jumlah dokumen SKM	1 dok				Jumlah dokumen SKM	1 dok		
		Jumlah dokumen monev kinerja triwulanan	4 dok				Jumlah dokumen monev kinerja triwulanan	4 dok		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.817.083. 252	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	8.817.083. 252	
SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali	8.770.822. 152	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali	8.770.822. 152	
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali				Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali		
SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	46.261.100	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	46.261.100	
Kegiatan Administrasi		Jumlah pelaksanaan	2 keg	63.484.00 0	Kegiatan Administrasi		Jumlah pelaksanaan	2 keg	63.484.00 0	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Kepegawaian Perangkat Daerah		kegiatan administrasi kepegawaian			Kepegawaian Perangkat Daerah		kegiatan administrasi kepegawaian			
SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	15 peg	63.484.000	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	23 peg	63.484.000	
		Jumlah pegawai yang dibina	70 peg				Jumlah pegawai yang dibina	70 peg		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	427.974.7 00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	427.974.7 00	
SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	2.396.000	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	2.396.000	
SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	0 unit	157.596.20 0	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	157.596.20 0	
		Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan				Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan		
SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set	7.869.000	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set	7.869.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	81.263.000	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	81.263.000	
SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah barang cetakan	7 barang	61.831.500	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis	61.831.500	
		Jumlah bulan penggandaan	12 bulan				Jumlah bulan penggandaan	12 bulan		
SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	3.500.000	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	3.500.000	
SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan	113.519.00 0	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan	113.519.00 0	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	77.675.00 0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	77.675.00 0	
SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit	77.675.000	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit	77.675.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	119.377.4 00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	119.377.4 00	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat</i>	<i>12 bulan</i>	<i>88.677.400</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat</i>	<i>12 bulan</i>	<i>88.677.400</i>	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>30.700.000</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan jasa komunikasi</i>	<i>12 bulan</i>	<i>30.700.000</i>	
		<i>Jumlah bulan jasa listrik</i>	<i>12 bulan</i>				<i>Jumlah bulan jasa listrik</i>	<i>12 bulan</i>		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	283.170.0 00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	282.832.0 64	
<i>SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pemberian BBM</i>	<i>12 bulan</i>	<i>193.940.00 0</i>	<i>SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pemberian BBM</i>	<i>12 bulan</i>	<i>193.940.00 0</i>	
		<i>Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak</i>	<i>10 unit</i>				<i>Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak</i>	<i>10 unit</i>		
		<i>Jumlah unit kendaraan yang di KIR</i>	<i>1 unit</i>				<i>Jumlah unit kendaraan yang di KIR</i>	<i>1 unit</i>		
		<i>Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan</i>	<i>10 unit</i>				<i>Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan</i>	<i>10 unit</i>		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Perubahan RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
		<i>Jumlah unit kendaraan yang diservice</i>	<i>3 unit</i>				<i>Jumlah unit kendaraan yang diservice</i>	<i>5 unit</i>		
<i>SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan peralatan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>89.230.000</i>	<i>SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Kota Cimahi</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan peralatan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>89.230.000</i>	
				13.139.060.952					13.139.060.952	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (diolah).

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan renja dilaksanakan kegiatan forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mempertajam indikator dan sinergitas program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Dari pelaksanaan forum perangkat daerah itu sendiri diperoleh masukan, yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan teknologi informasi terbaru dengan pembangunan/ pengembangan IT sebagai sarana komunikasi, integrasi kesisteman, layanan dan informasi lebih cepat dan mudah, memudahkan akses informasi, serta kemudahan dalam pelayanan secara digital/ elektronifikasi dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi dan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah dan Penggalian potensi pendapatan daerah lainnya.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat berada pada program pengelolaan pendapatan daerah. Berikut ini penelaahan usulan program dan kegiatan Bappenda Kota Cimahi hasil pelaksanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan pada tahun 2022 yang dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

**TABEL 2.11
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA CIMAHI**

Nama Perangkat Daerah : Bappenda Kota Cimahi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-6,52%
			% Realisasi Pajak Daerah	100,00%
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi WP	118.580 WP
1	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dok

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
2	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	3 dok
			Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 dok
3	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	7 keg
4	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul
			Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem
			Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan
5	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	118.580 WP
6	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	118.580 WP
7	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	115.098 WP
8	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	118.580 WP
9	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	116.425 WP
10	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	1.616 WP
11	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100 %
12	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak
13	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	BB Predikat
			% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100 %
			% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59 %
II	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dok
14	<i>SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Cimahi	<i>Jumlah dokumen anggaran</i>	<i>4 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen renja</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen renstra</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen renja perubahan</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah forum perangkat daerah</i>	<i>1 keg</i>
15	<i>SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kota Cimahi	<i>Jumlah dokumen LKIP</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen LKPD dan LPPD</i>	<i>2 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen SAKIP</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen SKM</i>	<i>1 dok</i>
			<i>Jumlah dokumen monev kinerja triwulanan</i>	<i>4 dok</i>
III	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan
16	<i>SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Cimahi	<i>Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi</i>	<i>14 kali</i>
			<i>Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi</i>	<i>12 kali</i>
17	<i>SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	Kota Cimahi	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran</i>	<i>2 dok</i>
IV	Kegiatan		Jumlah pelaksanaan	2 keg

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		kegiatan administrasi kepegawaian	
18	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	23 pegawai
			Jumlah pegawai yang dibina	70 pegawai
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
19	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan
20	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket
			Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan
21	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set
22	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor	12 bulan
23	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis
			Jumlah bulan penggandaan	12 bulan
24	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan
25	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan
26	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan
27	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan
28	SubKeg Penyediaan	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa	12 bulan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		komunikasi	
			Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan
29	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan
			Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit
			Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit
			Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit
			Jumlah unit kendaraan yang diservice	5 unit
30	SubKeg Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam perubahan Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPJMD. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2017-2022, adalah :

1. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan
2. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Dampak Sosial dan Ekonomi
3. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Penanggulangan Pengangguran
6. Peningkatan Upaya Pemerataan Pendapatan
7. Optimalisasi Peran Sektor Industri Kecil Menengah, Perdagangan Dan Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah
8. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
9. Peningkatan Keamanan, Kenyamanan, dan Keselamatan Bertransportasi
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

11. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
12. Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
13. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat
14. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
15. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

3.2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi serta target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan dua misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi :

- Pertama,** Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Kedua,** Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir (*Ultimate Goal*) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Bappenda merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota

Cimahi, yaitu meningkatkan desentralisasi fiskal dengan tolak ukur indikator kinerja Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Sasaran organisasi juga merupakan penjabaran dari RENSTRA dan RPJMD Kota Cimahi. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya pendapatan asli daerah dengan tolak ukur indikator kinerja persentase peningkatan PAD per tahunnya. Sasaran ini menjadi tanggung jawab pencapaian kinerja Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Bappenda beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	28,80%
	Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD per Tahunnya	-7,42%

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah tanggal 8 agustus 2022

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Bappenda Kota Cimahi telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- I. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 5. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 6. Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 7. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 8. Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 9. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 10. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
 - 11. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 12. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

13. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

2 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

14.Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

15.Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

III. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

16.Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

17.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD

IV. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

18.Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

V. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

19.Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

20.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

21.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

22.Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik

23.Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

24.Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

25.Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VI. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

26.Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VII. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

27.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 28.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- VIII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 29.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 30.Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPJMD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2022

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Peningkatan target pajak daerah	-6,52%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yag ditetapkan menjadi SKPD	118.580 WP	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen	58.429.400
	% Realisasi pajak daerah	100%				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah dokumen produk hukum	3 dokumen	207.370..200
								Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	1 dokumen	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	7 kegiatan	144.637.200
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul	658.013.600
								Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 sistem	
								Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah data WP yang terdaftar	118.580 WP	341.468.000
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang tervalidasi	118.580 WP	51.921.000
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	115.098 WP	95.756.700
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah WP yang ditetapkan	118.580 WP	815.010.600
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah WP yang diverifikasi	116.425 WP	168.960.300
						Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	0 kali	130.230.600
								Jumlah penagihan kepada WP self dan official assessment	1.616 WP	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%	112.969.100						

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 Objek Pajak	291.620.100
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali	78.111.800
Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB Predikat	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen	69.394.200
	% Unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%						Jumlah dokumen renja	1 dokumen	
								Jumlah dokumen renstra perubahan	1 dokumen	
								Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen	
								Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan	
	% ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen	56.288.800
								Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2 dokumen	
								Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen	
								Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	
								Jumlah laporan monev kinerja triwulanan	4 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali	8.770.822.152		
						Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	46.261.100		
	Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	23 pegawai	63.484.000		
						Jumlah pegawai yang dibina	70 pegawai			
	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	2.399.800		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	157.596.200
				Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan					

Program	Indikator Program	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	17 jenis/ set	7.892.400
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12 bulan	81.263.000
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah jenis barang cetakan	7 jenis	61.831.500
								Jumlah bulan penggandaan	12 bulan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan	3.500.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan	113.519.000			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	1 unit	77.675.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	12 bulan	88.677.400
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan	30.700.000
								Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan	264.055.000
								Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	
								Jumlah unit kendaraan yang diservice	5 unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan	89.230.000
Jumlah Pagu Indikatif										13.139.060.952

(Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai satu kesatuan arah perencanaan strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja tersebut sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Perubahan rencana kerja Tahun 2022, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perubahan Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 ini, disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Didalam rencana kerja ini, memuat 1 (satu) unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, terdiri dari 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.139.060.952,- (*tiga belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah*), terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.154.498.500,- (*tiga milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), sebagai penunjang pencapaian tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 9.984.562.352,- (*sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan penting yang menjadi perhatian utama Bappenda dan merupakan rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya, yaitu melaksanakan penyusunan perda/ perwal tentang pajak daerah, sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebabkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga perda dan perwal yang menjadi turunannya pada Tahun 2024 sudah tidak berlaku lagi, pelaksanaan TP2DD, yang menjadi amanat dari Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, serta peningkatan kompetensi pegawai Bappenda, yang belum seluruhnya memiliki kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah, melaksanakan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya perubahan rencana kerja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis

dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah.

Demikian perubahan rencana kerja perangkat daerah ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang akan dilaksanakan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022. Disadari bahwa dalam penyusunan peerubahan rencana kerja ini, masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, Agustus 2022

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003199101 1 002